

MEMBONGKAR NU MAGELANG (Menakar ke"NU"an warga Nahdhiyin Magelang antara NU Kultural dan Struktural dan Pengaruhnya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat)

Moh. Fatkhan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

Magelang is one of territorial base of NU in Central Java, as a santri territory it has very strong tradition of pesantren. The pesantren tradition deep-rooted in NU, has a princip that the kiai is a figure cannot be opposed by its santris or its followers.

The strong pesantren tradition in the NU's affiliate influences the way of NU's organization in many levels whether it is in regency level (cabang), district level (anak cabang), and village level (ranting). The ideal of NU's organization not only exists and operates in the level of regency (cabang) and district (anak cabang) but also should exist and operate in every villages (ranting).

However in reality, NU at Magelang regency in structural/jamiah/organizational level is very alarming. This is proven by the very few of NU's organization in the level of village/ranting that exist and operate. Some of Magelang residents are more proud to declare theirself as cultural NU than structural NU. Many NU's affiliates do not want to be verified as a member of NU's organization, having Kartanu (NU member card), moreover became NU's officer, though culturally they are NU's affiliate.

This condition besides has an effect in NU's organization also has consequence in political reality in Magelang regency, such as the defeat in legislative election and Magelang regent election.

Therefore by carry out field research, researcher will try to describe objective condition the respons of NU's affiliate in Magelang regency towards NU's organization Magelang regency from the perspective of cultural NU's community as the target object and their influence to the empowerment of Magelang community.

Key Word:...?

Magelang merupakan salah satu daerah *basis NU* di Jawa Tengah, disamping merupakan wilayah santri yang sangat kuat memegang tradisi pesantrennya. Tradisi pesantren yang telah berakar dalam tubuh NU, sangat memegang teguh prinsip bahwa seorang kiai adalah sosok yang tidak bisa diganggu gugat oleh santrinya atau pengikutnya.

Kentalnya tradisi pesantren di kalangan warga NU ini juga berpengaruh pada keberlangsungan Organisasi NU, baik di tingkat Kabupaten (Cabang), kecamatan (Anak Cabang), maupun di tingkat desa/kelurahan (Ranting). Idealnya Organisasi NU tidak hanya terbentuk dan berjalan di tingkat Cabang/kabupaten dan Anak Cabang/kecamatan, tetapi seharusnya terbentuk dan berjalan juga di setiap Ranting/desa. Akan tetapi dalam realitasnya sekarang, NU di kabupaten Magelang dalam tataran structural/jamiah/Organisasi sangat memperhatikan. Hal ini dibuktikan dengan sangat sedikitnya organisasi NU di tingkatan Ranting/desa yang terbentuk dan bisa berjalan. Sebagian warga Magelang lebih bangga menyatakan dirinya sebagai NU (cultural) daripada NU (structural). Banyak warga NU yang tidak mau didata sebagai anggota organisasi NU, memiliki Kartanu (Kartu Tanda Anggota NU), apalagi menjadi pengurus NU, meskipun secara kultural yang bersangkutan adalah warga NU. Kondisi tersebut selain berdampak pada organisasi NU, juga berdampak pada perpolitikan di kabupaten Magelang, baik pada kekalahan di pemilu legislatif maupun di pemilu bupati Magelang. Oleh karena itu dengan mengambil jenis penelitian lapangan, penulis akan berupaya menggambarkan kondisi obyektif tanggapan warga NU Kabupaten Magelang, terhadap organisasi NU Kabupaten Magelang dari perspektif masyarakat NU cultural sebagai obyek sasaran dan pengaruhnya bagi pemberdayaan masyarakat Magelang.

Key Word:....?

A. Pendahuluan

NU adalah suatu *Jam'iyah diniyyah islamiyyah* (Organisasi Keagamaan Islam) yang didirikan di Surabaya pada 16 Rojab 1344 H/31 Januari 1926 M. Berakidah Islam menurut faham Ahlussunah wal jamaah dan menganut salah satu mazab empat : Syafii, Hanafi, Maliki dan Hambali.¹ Bentuk kekokohan NU di antaranya NU mampu mempertahankan nilai-nilai tradisi terdahulu yang diyakini baik yakni sikap toleran dan kooperatif terhadap tradisi kejawen yang telah berkembang di masyarakat, seperti membaca barzanji, manqiban, wiridan kolektif setelah selesai salat jamaah, tahlilan dan sebagainya.² Mengkaji seluk beluk NU berikut tradisi pesantrennya tidak dapat dilepaskan dari pesantren. Bahkan pesantren dapat dikatakan melekat dengan NU. Inisiator NU ada di pesantren. Karena kalau ditelusuri dari aspek historisnya terlihat jelas adanya hubungan antara pesantren dan NU. Dalam sejarahnya NU tidak dapat dipisahkan dengan pesantren, karena pesantren merupakan bagian yang tidak bias terpisahkan dari NU.³

¹ Anggaran Dasar NU Bab.1 pasal 1,3 dan 4 hasil muktamar xxv di Kediri,21-27 November 1999.

² Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il, 1926-1999*, (Yogyakarta: Lkis Yogya, 2004), hlm.23.

³ Saifulloh Ma'sum, *Kharisma Ulama Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm.32.

NU sendiri lahir juga dibidani oleh para Kyai pesantren dan eksis sampai sekarang juga tidak lepas dari dukungan pesantren. Pengikut organisasi NU ini hampir seluruhnya adalah mereka yang mempunyai hubungan emosional, tradisi ritual pesantren. Dengan kata lain, Pesantren dan NU adalah pilar tegaknya Islam tradisional. Akan tetapi tidak secara otomatis setiap pesantren yang ada sekarang adalah pilar NU, sebab sekarang ini ada pesantren yang merupakan pesantren Muhammadiyah Persis, Al-Irsyad ataupun Pesantren Modern seperti Gontor. Meskipun demikian secara umum sebagian besar pesantren di Indonesia berafiliasi dengan NU.⁴

Pesantren menjadi basis gerakan NU sejak masa perjuangan melawan penjajah dahulu sampai sekarang. Pada masa penjajahan, kyai pesantren adalah penggerak sekaligus pemimpin perjuangan melawan penjajah dan juga sebagai penguat spiritual bagi para pejuang.⁵ Sikap *tawadhu* / tunduk santri terhadap kyai merupakan kebiasaan/ciri khas kehidupan pesantren. Sikap kepatuhan mutlak mutlak pada kyai adalah nilai pertama yang ditanamkan pada setiap santri. Kepatuhan ini diperluas lagi, sehingga mencakup penghormatan terhadap terhadap ulama-ulama sebelumnya, sikap seperti ini diciptakan secara efektif melalui *Ta'lim al muta'alim* yang menjelaskan bagaimana seharusnya sikap santri kepada kyai.⁶

Di samping itu karakter santri sebagian besar berasal dari pedesaan yang mempunyai atau memegang nilai-nilai ketimuran seperti rendah hati kepada sesama, kepada yang lebih tua, terutama kepada kyai. Ketaatan yang demikian tentu ada positif dan negatifnya. Nilai positifnya antara lain memudahkan kyai mengorganisasikan atau mengatur santrinya untuk keperluan pesantren, termasuk keberlangsungan organisasi NU. Adapun aspek negatifnya antara lain : hilangnya sikap kritis santri pada kyai, begitu juga tidak tertutup kemungkinan adanya pemanfaatan sikap loyal santri oleh kyai seperti untuk keperluan politik.⁷

B. NU Kultural

NU kultural atau yang lebih dikenal dengan sebutan “Agama NU” banyak dipakai orang-orang Madura, orang-orang Yogyakarta (seperti alm. Mbah Marijan) dan orang-orang Jawa lainnya, termasuk orang-orang Magelang. Disini Agama NU diartikan oleh rakyat kita sebagai agamanya orang-orang NU, agamanya para ulama NU. Ketika disebut bahwa rakyat kita menganut agama NU, maka itu berarti mereka mengikuti yang terbaik dari tradisi para ulama dan orang-orang NU. Pada NU mereka melihat agama ulama, sekaligus agama rakyat. Mereka para rakyat melihat harapan baru untuk merawat tradisi mereka dengan berguru setiap hari kepada kyai-ulama minimal belajar doa-doa atau jimat keselamatan dunia akhirat. Mereka para rakyat juga melihat pada “agama NU” sebagai cara menggerakkan tradisi rakyat sebagai kekuatan bersama

⁴ Ahmad Baso “Agama NU” untuk NKRI, (Tangerang Selatan, Pustaka Afid, 2013), hlm.26.

⁵ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta : INIS, 1994), hlm. 25.

⁶ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il, 1926-1999*, (Yogyakarta: Lkis Yogya, 2004), hlm. 27.

⁷ *Ibid.*

menghadapi tantangan serta untuk mewujudkan hajat bagi orang-orang desa. “Anggemahaken ing desa” (berjuang demi kesejahteraan dan kemakmuran orang-orang desa), seperti dituturkan satu teks santri, *Serat Centini*. Semangat ini dilanjutkan oleh orang-orang pesantren, dan juga orang-orang NU. Tradisi *slametan* atau *kenduren* misalnya mendapatkan perlindungan di bawah “agama NU” ini.⁸

Dengan demikian, orang-orang yang telah balig yang setuju dengan Ahlussunnah wal jamaah, mengikuti salah satu dari empat mazab : Maliki, Hanafi, Syafi’I dan Hambali dapat disebut sebagai “Orang NU”

C. Keanggotaan NU

Menurut Anggaran Rumah Tangga NU, keanggotaan NU terdiri dari :

1. Anggota Biasa adalah setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam, balig dan menyatakan setia terhadap ADART Organisasi.
2. Anggota Luar Biasa adalah setiap orang yang beragama Islam, menganut faham ahlussunnah wal jamaah dan menurut salah satu mazab empat, sudah balig, menyetujui aqidah, asas, tujuan organisasi NU, namun yang bersangkutan berada di luar NKRI.¹⁰

Adapun tatacara penerimaan keanggotaan organisasi NU untuk anggota biasa adalah melalui pengurus ranting/desa atas rekomendasi dari anak ranting setempat, sedangkan yang mensyahkan anggota biasa adalah Pengurus Cabang/Kabupaten. Setiap anggota biasa maupun anggota luar biasa NU berhak mendapatkan Kartanu (Kartu Anggota NU).¹¹

Dalam menentukan basis pendukung atau warga NU ada beberapa istilah yang perlu diperjelas, yaitu: anggota, pendukung atau simpatisan, serta muslim tradisional yang sepaham dengan NU. Jika istilah warga disamakan dengan istilah anggota, maka sampai hari ini tidak ada satu dokumen resmipun yang bisa dirujuk untuk itu. Hal ini karena sampai saat ini tidak ada upaya serius di tubuh NU di tingkat apapun untuk mengelola keanggotaannya.

Dilihat dari segi pendukung atau simpatisan, ada dua cara melihatnya. Dari segi politik, bisa dilihat dari jumlah perolehan suara partai-partai yang berbasis atau diasosiasikan dengan NU, seperti PKBU, PNU, PKU, Partai SUNI, dan sebagian dari PPP. Sedangkan dari segi paham keagamaan maka bisa dilihat dari jumlah orang yang mendukung dan mengikuti paham keagamaan NU. Maka dalam hal ini bisa dirujuk hasil penelitian Saiful Mujani (2002) yaitu berkisar 48% dari Muslim santri Indonesia. Suaidi Asyari¹² memperkirakan ada sekitar 51 juta dari muslim santri Indonesia dapat

⁸ Ahmad Baso “*Agama NU*” untuk NKRI, (Tangerang Selatan, Pustaka Afid, 2013), hlm. 37.

⁹ H. Munawir Abdul Fatah, “*Tradisi Orang-Orang NU*”, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm.1-2.

¹⁰ Anggaran Rumah Tangga NU Bab.1 pasal 1 hasil muktamar xxv di Kediri, 21-27 November 1999.

¹¹ Anggaran Rumah Tangga NU Bab.II pasal 2 dan 5 4 hasil Muktamar xxv di Kediri, 21-27 November 1999.

¹² Nalar Politik NU & Muhammadiyah, 2009.

dikatakan pendukung atau pengikut paham keagamaan NU. Jumlah keseluruhan muslim santri yang disebut sampai 80 juta atau lebih, merupakan mereka yang sama paham keagamaannya dengan paham keagamaan NU. Namun belum tentu mereka ini semuanya warga atau mau disebut berafiliasi dengan NU.

D. Kepemimpinan NU Kharismatik-Profesional

Pesantren adalah sebuah lembaga milik masyarakat dalam arti lembaga tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, tetapi secara tradisi dan sejarah dikembangkan dan dimiliki oleh para kyai. Sedangkan kyai memainkan peranan yang secara komparatif lebih kuat dalam membentuk tingkah laku ekonomi, politik dan keagamaan. Sebagai seorang yang memiliki beberapa "kelebihan", kebanyakan kyai atau bahkan "gus"/putra kyai dianggap mempunyai ilmu laduni, yaitu suatu kemampuan untuk menguasai berbagai cabang pengetahuan Islam tanpa harus mempelajarinya.

Di samping itu kyai-kyai juga memperkuat kesan yang ada di masyarakat bahwa beberapa kyai adalah orang-orang yang luar biasa yang memiliki kelebihan-kelebihan spiritual seperti *karamah* (orang yang memiliki keutamaan budi dan karisma) dan dapat menjadi penyalur barokah (kemurahan dan hadiah kebagusan) dari Allah untuk para pengikutnya, dengan kata lain orang percaya bahwa kyai tersebut dapat menjadi penyalur kesucian dan kemurahan Allah. Namun demikian, kepercayaan ini berlaku selama para kyai tersebut adalah orang-orang yang *wira'i*, yang selalu menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, makruh atau *syubhat*.

Oleh karena banyak orang-orang yang percaya bahwa para kyai memiliki atribut spiritual yaitu *karamah* dan penerus *barakah* dari Allah, maka kebanyakan mereka dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang kharismatik.¹³

E. Pengurus Ideal NU sebagai Jam'iyah

Hakikat NU sebagai *jam'iyah diniyah-ijtima'iyah*, idealnya pengurus NU mempunyai ciri-ciri,¹⁴

Pertama, seorang pengurus NU, meski tinggal di kota, tetapi berkecimpung di desa dan di dusun di kalangan rakyat yang menderita. Ini asli hakekat seorang pengurus NU. Soal hidup di desa seperti ini bukan perkara main-main, dan itu tidak asal kos di desa atau mengontrak di kampung.

Kedua, kedekatan itu kemudian memungkinkan kyai mempunyai komunikasi yang terus menerus dengan rakyat, serta menyatu dengan rakyat. Ini pula yang seharusnya diikuti oleh pengurus NU. Sebab kalau tidak, barisannya akan berantakan. Seperti yang dialami kader-kader Syahrir di PSI. Sementara barisan kyai (Kyai Wahab Hasbullah) tetap utuh. Inilah rahasia kekuatan NU yang diakui orang-orang desa sendiri/penganut agama NU kultural

¹³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren (Studi tentang Pandangan Hidup Kyai)*, (Jakarta : LP3ES, 1982), hlm. 89-71.

¹⁴ Ahmad Baso "Agama NU" untuk NKRI, (Tangerang Selatan, Pustaka Afid, 2013), hlm..37-38.

Kondisi inilah yang memungkinkan warga NU merasa ikut memiliki NU bersama-sama. Sehingga NU pun tetap langgeng dan lestari dan tidak mengalami nasib seperti PSI, Masyumi, OKI atau PNI. Orang-orang desa sekalipun meski mereka tidak punya Kartanu (Kartu Anggota NU), menjadi gampang untuk dimobilisasi dan juga diorganisasi. Kalau ada hajatan NU, seperti Munas atau Mukhtamar, rakyat lapisan bawah ini bisa berbondong-bondong membantu membawa ayam, kambing, dan segenap keperluan selama acara NU berlangsung. Sehingga pengurus NU tidak perlu membawa proposal mencari dana. Karena warga NU sendiri yang mencukupi kebutuhan mereka selama kegiatan berlangsung. Hal ini terjadi dikarenakan para pengurus NU mempunyai kedekatan dan komunikasi terus menerus dengan rakyat, serta menyatu dengan mereka.

Apabila dibandingkan dengan pengurus NU yang sudah kehilangan kriteria “harus dapat berkomunikasi terus menerus dengan rakyat dengan memakai media bahasa rakyat, budaya rakyat, selera rakyat dan empati rakyat” Jelas mereka akan seperti barisannya Syahrir, yang akan hancur berantakan.

Inilah yang mesti diingatkan kepada para pengurus NU dan kade-kader mudanya. Ketika ada jarak atau keterpisahan antara pengurus dengan jamaahnya, maka di situlah awal terjadinya proses pelemahan NU. Kalau para pengurusnya lebih didominasi orang-orang akademisi, pengusaha atau birokrat, mereka pasti akan sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri. Waktu untuk umat pasti akan habis untuk pekerjaannya. Jelas logika mereka tidak akan nyambung dengan masalah pengabdian kepada umat Nahdliyyin yang membutuhkan keikhlasan tanpa pamrih. Kalau orang-orang seperti itu yang mengurus NU, maka itu tanda-tanda hancurnya barisan organisasi dan jamaah NU.¹⁵ Oleh karena itu, Pengurus NU perlu mengidealkan sosok Kyai Wahab Hasbullah, sosok pengurus NU yang berkecimpung langsung di desa-desa dan dusun-dusun, hidup di tengah-tengah rakyat yang menderita. Di sana Kyai Wahab menjadi penenang keresahan masyarakat, beliau senantiasa menjalin komunikasi yang terus menerus dengan rakyat, dan menyatu dengan rakyat. Itulah arti mengapa KH. Hasyim Asy’ari dan Kyai Wahab Hasbullah menempatkan NU sebagai Jama’ah dan Jam’iyah sekaligus.

Oleh karena itu, kini ada perubahan mendasar dalam rencana tata keorganisasian NU. Sebagaimana hasil rapat Pleno PBNU di Wonosobo Jawa Tengah, pada bulan September tahun 2013. Komposisi kepengurusan NU, nantinya tidak akan lagi dipilih langsung (seperti di arena Mukhtamar), tetapi berlangsung melalui pemilihan oleh kolektifitas ulama dalam wadah *ahluhalli wal aqdi*, yakni sekelompok ulama sepuh yang mempunyai otoritas dan kharisma yang akan menentukan komposisi kepengurusan yang berhaluan Aswaja dan berbasis pada jamaah. Dalam sejarah NU, pemilihan oleh *ahluhalli wal aqdi* ini terakhir terjadi di Mukhtamar Situbondo tahun 1984. Para peserta mukhtamar memilih secara aklamasi satu formatur di bawah pimpinan al Maghfurillah Kyai As’ad Syamsul Arifin. Formaturnya ini kemudian membentuk susunan pengurus untuk jajaran syuriah dan tanfidziyah PBNU. Maka terpilihlah KH. Achmad Shiddiq sebagai Rais Aam PBNU dan Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU. Kepemimpinan

¹⁵ Ahmad Baso “*Agama NU*” untuk NKRI, (Tangerang Selatan, Pustaka Afid, 2013), hlm . 40.

kolektif ulama inilah, yang diharapkan nantinya akan bisa menentukan kualitas arah dan gerak roda organisasi NU, yakni NU dalam tiga pilar: Jama'ah. Jam'iyah dan ideologi kebangsaan sekaligus.¹⁶

F. Membongkar NU Magelang

NU yang berdiri pada tahun 1926 mengklaim sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, dan lebih dari 40 juta muslim adalah pengikut NU.¹⁷

Demikian halnya Magelang, juga diklaim sebagai salah satu daerah basis NU di Jawa Tengah, di samping, Kabupaten Tegal, Kendal dan Jepara.¹⁸ Hampir 36% warga Magelang menyatakan diri sebagai warga NU, walaupun dalam tataran ritual atau dalam bahasa Ahmad Baso sebagai “Agama NU”, sebuah komunitas yang mampu mempertahankan nilai-nilai terdahulu yang diyakini baik yakni sikap toleran dan kooperatif terhadap tradisi kejawaan yang telah berkembang di masyarakat, seperti membaca barzanji, manaqiban, wiridan kolektif setelah selesai salat jamaah, tahlilan dan sebagainya,¹⁹ sebuah klaim yang membutuhkan kajian ulang.

Di sisi yang lain Magelang juga merupakan wilayah santri, terdapat 150an pesantren NU, yang terdiri dari 25 buah pesantren besar dan 125 pesantren kecil, yang masing-masing pesantren diasuh oleh seorang kyai yang berpengaruh. Tradisi pesantren yang telah berakar dalam tubuh NU menjadikan komunitas warga NU di Magelang dalam beberapa dekade tetap memegang teguh prinsip bahwa seorang kyai adalah sosok yang tidak bisa diganggu gugat oleh santrinya ataupun pengikutnya. Sikap *tawadhu* / tunduk santri terhadap kyai merupakan kebiasaan/ ciri khas kehidupan pesantren. Sikap kepatuhan mutlak pada kyai adalah nilai pertama yang ditanamkan pada setiap santri. Kepatuhan ini diperluas lagi, hingga mencakup penghormatan terhadap terhadap ulama-ulama sebelumnya, sikap seperti ini diciptakan secara efektif melalui kitab *Ta'lim al muta'alim* yang menjelaskan bagaimana seharusnya sikap santri kepada kyai.²⁰

Dengan demikian, kentalnya tradisi pesantren di kalangan warga NU ini pada akhirnya akan berpengaruh pada keberlangsungan Organisasi NU, baik di tingkat Kabupaten (Cabang), kecamatan (Anak Cabang), maupun di tingkat desa/kelurahan (Ranting). Idealnya organisasi NU di Kabupaten Magelang tidak hanya terbentuk dan berjalan di tingkat Cabang/Kabupaten dan Anak Cabang/Kecamatan, tetapi seharusnya terbentuk dan berjalan juga di setiap ranting/desa. Hal ini disebabkan karena NU berikut tradisinya tidak dapat dilepaskan dari pesantren ataupun kyai desa. Bahkan pesantren dapat dikatakan melekat dengan NU. Inisiator NU ada di pesantren. Bahkan kalau ditelusuri dari aspek historisnya terlihat jelas adanya hubungan antara pesantren

¹⁶ *Ibid.* hlm. 41.

¹⁷ Suaidi Asyari, *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah*, (Yogyakarta : Lkis, 2009).

¹⁸ Suara Merdeka 18 April 2007 “Pilihan Warga NU pada Pilgub 2008”.

¹⁹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il, 1926-1999* (Yogyakarta: Lkis Yogya, 2004) hlm.23.

²⁰ *Ibid.* hlm. 27.

dan NU. Dalam sejarahnya NU tidak dapat dipisahkan dengan pesantren, karena pesantren merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari NU.²¹

NU sendiri lahir juga dibidani oleh para kyai pesantren dan eksis sampai sekarang juga tidak lepas dari dukungan pesantren. Pengikut organisasi NU ini hampir seluruhnya adalah mereka yang mempunyai hubungan emosional, tradisi ritual pesantren. Dengan kata lain, Pesantren dan NU adalah pilar tegaknya Islam tradisional. Akan tetapi tidak secara otomatis setiap pesantren yang ada sekarang adalah pilar NU, sebab sekarang ini ada pesantren yang merupakan pesantren Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad ataupun Pesantren Modern seperti Gontor, demikian halnya di Kabupaten Magelang. Meskipun demikian secara umum sebagian besar pesantren di Indonesia, termasuk di Magelang berafiliasi dengan NU.²²

Akan tetapi dalam realitasnya sekarang, NU di Kabupaten Magelang dalam tataran struktural/jamiah/organisasi sangat memperhatikan. Hal ini dibuktikan dengan sangat sedikitnya organisasi NU ditingkatan ranting/desa yang terbentuk dan bisa berjalan sebagaimana layaknya sebuah Organisasi, yakni adanya pengurus, mempunyai Kartu Tanda Anggota NU (Kartanu) bagi anggotanya, program kerja yang berjalan, dan administrasi organisasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun justru yang lebih ironis, sebagian warga Magelang lebih bangga menyatakan dirinya sebagai NU (kultural) daripada NU (struktural). Hal ini bisa dibuktikan dari hasil survei penulis di beberapa wilayah di Kabupaten Magelang,²³ banyak warga yang tidak mau didata sebagai anggota organisasi NU, memiliki Kartanu (Kartu Tanda Anggota NU), apalagi menjadi pengurus NU, meskipun secara kultural yang bersangkutan adalah warga NU.

Bahkan berdasar survei LSI, warga Magelang yang teridentifikasi 'Nahdhatul Ulama (NU) mengalami penurunan dari 83% menjadi 36,5%, sedangkan Muhammadiyah hanya 5,4%. Survei tersebut diambil kepada masyarakat dengan cara menanyakan langsung mengenai identitas dirinya NU atau Muhammadiyah. Hasilnya, hanya 5,4% orang yang menyatakan bahwa dirinya adalah Muhammadiyah.²⁴ Data lain mengindikasikan bahwa basis NU terogoti organisasi lain²⁵

²¹ Saifulloh Ma'sum, *Kharisma Ulama Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 32.

²² Ahmad Baso "Agama NU" untuk NKRI, (Tangerang Selatan: Pustaka Afid, 2013), hlm. 26.

²³ Survei peneliti yang juga merupakan Pengurus Lakpesdam NU kabupaten Magelang yang dilakukan dalam rangka sosialisasi dan pendataan dan pembuatan Kartanu (Kartu Anggota NU) pada Agustus 2014.

²⁴ Menurut Hajriyanto, yang juga Ketua Lembaga Amil Zakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Lazizmu), penurunan jumlah warga beridentitas Muhammadiyah tersebut sangat memperhatikan mengingat Muhammadiyah mempunyai amal usaha yang sangat banyak, termasuk sekolah dan perguruan tinggi. Namun tetap saja, hal tersebut tidak mampu menunjukkan seseorang beridentitas Muhammadiyah. "Dalam survei sebelumnya, warga yang teridentifikasi beridentitas Muhammadiyah mencapai 8%", terang Harjiyanto. Hajriyanto menuturkan bahwa sekarang ini semua orang cenderung mengaku orang NU, termasuk Ketua DPR RI, Marzuki Ali, yang mengaku orang NU walaupun tidak pernah masuk struktur dan tidak aktif. Hajriyanto juga memaparkan bahwa survei yang dipaparkannya tersebut baru sekedar tentang identitas, belum tentang tata cara beribadah yang sesuai dengan pandangan Muhammadiyah. Hajriyanto memandang Muhammadiyah perlu mengkaji ulang terkait kemerosotan identitas tersebut.

²⁵ Tempo, Minggu April 2007.

Kondisi tersebut pada akhirnya selain berdampak bagi perjalanan organisasi NU di kabupaten Magelang dalam memberdayakan masyarakat, juga berdampak juga pada perpolitikan di kabupaten Magelang, baik pada kekalahan di pemilu legislatifnya maupun di pemilu bupati.

Fenomena tersebut disebabkan diantaranya munculnya perilaku resistansi warga di Kabupaten Magelang, dimana masyarakatnya yang mayoritas warga NU yang memiliki karakter kepatuhan terhadap ulama' sangat tinggi mulai mengalami penurunan. Tradisi pesantren yang menganggap sosok kyai adalah yang paling benar, yang mampu menggiring warga NU untuk selalu mematuhi apa yang dititahkan oleh seorang kyai, tidak hanya dalam menentukan terbentuk dan berjalannya organisasi NU, termasuk juga dalam menentukan pilihan-pilihan politik, kini mulai mengalami penurunan dan kurang lagi memiliki pengaruh besar bagi para pengikutnya.

Hal tersebut disebabkan adanya keharmonisan hubungan antara kyai dan warga Nahdliyin yang menurun ketika dihadapkan pada pemikiran politik. Hal ini disebabkan perilaku memilih "pemilih tradisional" warga NU di Kabupaten Magelang sering dibuat bingung dengan tidak bersatunya antara kyai yang satu dengan kyai yang lainnya dalam berpolitik, meskipun beberapa kyai mengaku sebagai warga NU. Warga NU di Magelang sekarang sepertinya sudah tidak lagi terlalu percaya dengan kyai yang terjun ke dunia politik.

Pasca Orde Baru, terdapat fenomena unik pada diri NU dalam hal berpolitik. Perubahan peta sosial-politik pada masa itu direspon NU dengan cara, salah satunya, menggagas sebuah partai politik yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia kecil dalam rangka merumuskan pembentukan partai politik tersebut. Lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang dibidani kelahirannya oleh (alm) K.H. Abdurrahman Wahid. PKB lantas diklaim sebagai satu-satunya sayap politik resmi milik warga NU.

Sebelumnya, nama yang diusulkan PBNU adalah Partai Kebangkitan Umat (PKU). Kalau dicermati dengan seksama, tindakan para tokoh NU ini cukup mengindikasikan adanya kecenderungan pergeseran sikap, orientasi dan bahkan perilaku politik (*political action*) pada diri NU. Kalau selama ini pola perilaku politik NU bercorak kultural (*cultural oriented*) dengan fokus gerakan pada pembelaan dan pemberdayaan masyarakat, kini perilaku politik NU kian menampilkan wajahnya yang struktural (*structural oriented*). Sekilas perilaku politik NU ini dapat dikatakan kontra-produktif dengan pola perilaku politik NU pasca khittah di mana NU telah memutuskan untuk menarik diri dari percaturan politik praktis untuk kembali kepada garis perjuangan semula yakni sebagai organisasi sosial-keagamaan. Juga aktivitas perpolitikan NU yang banyak diorientasikan kepada pemberdayaan masyarakat sipil (*civil society*) dalam kerangka kontrol terhadap kekuasaan (*moral force*). Namun demikian, tindakan NU untuk turut membidani kelahiran PKB dan keterlibatan politik di dalam partai itu tidak serta merta dapat dijadikan dalih untuk menjustifikasi bahwa NU telah berpolitik praktis dan mengingkari khittah tersebut. Sebab, NU sendiri telah membuat garis pembatas yang sangat tegas dimana hubungan antara NU dan PKB

hanyalah bersifat moral, kultural, historis, aspiratif, bukannya bersifat struktural.

Banyaknya partai politik yang lahir dari rahim Islam memberikan dampak pemencaran kepemimpinan umat dan elit politik muslim, dari satu segi dapat dikatakan sebagai perwujudan dari demokratisasi dan egalitarianisasi kepemimpinan umat islam (kyai). Tetapi pada segi lain mencerminkan terdapatnya rivalitas kepemimpinan kyai yang pada gilirannya memunculkan konflik antar kyai dan massa pendukung kyai. Terdapat kecendrungan kuat dalam lapisan elite muslim untuk mengklaim posisi kepemimpinan tertinggi bagi diri masing-masing. Semua ingin menjadi pimpinan, tidak ada yang ikhlas menjadi anak buah. Karena itulah apa yang terjadi adalah rivalitas dan konflik yang tidak pernah terselesaikan.

Oleh karena itu, peran kyai dalam politik tidak selamanya berjalan mulus seiring dengan berbagai kepentingan politik itu, karena masing-masing kyai memiliki kepentingan dan strategi dalam meraih dukungan untuk memperoleh kekuasaan, sehingga tidak jarang terjadi gesekan-gesekan antar kyai, yang akan membuat bingung pengikutnya. Antara kyai yang satu dengan kyai yang lain, memiliki posisi yang sama di hati masyarakat, sehingga keberagaman pilihan politik para kyai dalam berbagai partai politik akan membuat masyarakat menjadi bingung, karena setiap kyai akan memberikan legitimasi yang meyakinkan untuk mendukung partai yang menjadi pilihan politiknya. Akibatnya, pesantren yang dikelola oleh kyai tertentu akan diklaim sebagai basis partai politik tertentu yang pada akhirnya akan menciptakan jarak dengan masyarakat yang tidak sehaluan. Masyarakat menjadi terkotak-kotak akibat perbedaan aliran politik para kyai.

Hal ini secara otomatis akan membuka ruang lebar terciptanya perpecahan di kalangan masyarakat. Masuknya kyai dalam politik praktis menyebabkan berbagai kalangan masyarakat terutama masyarakat yang masih atau pernah nyantri (belajar agama) di pondok pesantren atau masyarakat yang sedang memondokkan putra-putrinya ke lembaga pesantren semakin mendorong mereka untuk tetap setia terhadap kyai atau partai politik pilihan kyai-nya, sehingga ikatan emosional kyai dengan masyarakat/santri semakin tinggi yang pada akhirnya mengakibatkan potensi terbentuknya konflik dalam masyarakat. Seperti yang terjadi di Kabupaten Magelang yang sampai sekarang masih belum terselesaikan. Konflik massa antar pendukung kyai ini adalah fanatisme masyarakat terhadap kyai yang menjadi panutan masyarakat Magelang yaitu putra dari almarhum KH. Ahmad Abdul Haq (bah Mad) (KH. Aly Choesor) dan KH. Muhammad Yusuf Chudhori (Gus Yusuf). Kedua kyai ini sama-sama menjadi pengasuh di dua pesantren yang berbeda dan berafiliasi dalam politik praktis yang berbeda pula; Gus Aly berafiliasi dengan PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Gus Yusuf dengan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).

Sebelum terjadi pemencaran kepemimpinan kyai dalam afiliasi politik praktis, kehidupan masyarakat Magelang relatif stabil dan tidak terdapat konflik yang mencuat kepermukaan (manifest). Tetapi pada saat terjadi perbedaan dalam memilih partai politik antara Gus Aly dengan Gus Yusuf, konflik mulai muncul pada masyarakat Magelang yang sekaligus merupakan basis pendukung kedua kyai tersebut. Munculnya

konflik tersebut merupakan manifestasi dari kesetiaan dan pembelaan mereka terhadap kyai yang menjadi panutannya. Sebuah bukti yang tidak terbantahkan bahwa fenomena konflik antar pendukung tersebut menjadi manifestasi adalah keberadaan dua wilayah yang jaraknya berdekatan antara satu sama lain, yang oleh masyarakat masing-masing pendukung kyai digunakan sebagai kiblat orang NU Magelang, yang lebih dikenal NU kulon kali dan NU wetan kali.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahawa faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik Kyai NU dan apa dampak bagi massa pendukungnya di Kabupaten Magelang, sehingga menimbulkan konflik di masyarakat dapat dipilah lebih lanjut latar belakang atau akar permasalahannya, menjadi beberapa konflik sebagai berikut :

1. Konflik Keluarga

Konflik keluarga merupakan faktor dominan di dunia pesantren, lahirnya konflik keluarga berkaitan erat dengan sistem warisan pengelolaan pesantren. Menjadi pengelola atau pengasuh pesantren adalah impian bagi semua kyai, sebab bila seorang kyai memiliki pesantren, maka eksistensinya sebagai kyai lebih dihormati oleh ummat, atau paling tidak kyai memiliki pengikut inti yaitu santri, wali santri atau alumni. Sebaliknya, bila kyai tidak memiliki pesantren, maka keberadannya kurang afdhol (utama) oleh kalangan kyai dan pengikutnya sebatas massa yang mengambang (*floating mass*).

Menjadi pengasuh pesantren atau menjadi orang nomor satu di dunia pesantren merupakan impian semua kyai, sebab bila menjadi pengasuh, maka seorang kyai akan mendapatkan kepuasan secara abstrak seperti banyak pengikut, kharisma, ketokohan, dihormati, dan lain sebagainya. Selain kepuasan abstrak, kepemimpinan dalam sebuah pesantren juga terkait dengan akses ekonomi. Konflik keluarga dalam tradisi pesantren muncul ketika pendirinya telah wafat kemudian tampuk kepemimpinan dan otoritas pengelolaannya ditangani oleh anak-anak kyai. Konflik keluarga mengemuka manakala sang ayah yang telah wafat tidak memberikan wasiat siapa yang berhak memegang tampuk kepemimpinan pesantren. Konflik tidak terjadi manakala anak-anak kyai masih kecil-kecil dan dalam kondisi tanpa kyai biasanya pengelolaan pesantren ditangani oleh pengurus dan ustadz (guru) yang selam ini dijadikan badal (pengganti kyai bila berhalangan). Namun situasi semacam ini bersifat temporal, kelak bila anak-anak kyai telah dewasa, konflik dapat muncul sedemikian rupa. Potensi konflik dalam keluarga masih muncul walaupun kyai telah berwasiat kepada siapa tampuk kepemimpinan pesantren akan diserahkan. Konflik semacam ini patut untuk dicegah sedini mungkin dengan mempererat tali persaudaraan.

2. Konflik Politik

Konflik politik dalam dunia pesantren merupakan salah satu hal yang paling krusial, sebab bentuk konflik jenis ini eskalasinya lebih kuat dan seringkali termanifestasi. Mengemukanya konflik yang disebabkan oleh perbedaan pilihan dan sikap politik,

menjadi berbeda dengan konflik lain yang ada di dunia pesantren. Sebab, konflik politik biasanya disebabkan masuknya pihak luar pesantren dan seringkali menjadi bagian dari konflik itu sendiri. Faktor eksternal diyakini sebagai penyebab konflik politik, di sisi yang lain masyarakat pesantren melihat instrumen pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan, yang tidak terkait dengan masalah kekuasaan atau politik. Karenanya, bila ada konflik yang disebabkan politik, mereka beranggapan telah ada unsur kepentingan luar yang menggunakan pesantren sebagai alat politik. Berdasarkan hal tersebut, wajar bila konflik yang disebabkan karena politik lebih cepat diketahui oleh masyarakat ketimbang konflik yang disebabkan oleh faktor lain. Kyai sedapat mungkin menghindari konflik, bila tetap terjadi, maka diminimalisir dan diniatkan tidak ada kepentingan. Berbeda bila konflik kepentingan terjadi, sebab bila sudah menjadi komoditas, berlaku hukum pasar pula, sesuatu yang menguntungkan akan dipertahankan. Konflik pun tak kunjung usai lantaran disengaja agar tetap berlangsung.

3. Konflik Perebutan Pengakuan ummat.

Ciri yang melekat dalam sistem sosial masyarakat tradisional adalah adanya elit yang dijadikan panutan, pemimpin atau tokoh. Bahkan tokoh panutan tersebut cenderung dikultuskan karena memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Karenanya untuk menjadi bagian dari elit tradisional, seseorang dituntut mempunyai keistimewaan yang diakui oleh masyarakat seperti; kharisma, kewibawaan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain atau orang pada umumnya, dan lain sebagainya.

4. Konflik Feodalisme. Feodalisme dalam masyarakat pesantren merupakan salah satu ciri sebagaimana identitas masyarakat tradisional lainnya. Feodalisme yang kental adalah pengkultusan terhadap figur kyai, dari sini berimplikasi pada pola hubungan kyai dan santri yang vertikal. Pola pengkultusan terjadi bukan hanya terbentuk secara kultural namun dipengaruhi pula oleh norma yang bersumber pada nilai agama yaitu keharusan *ta'zim* (penghormatan) terhadap guru. Norma tersebut melahirkan derivasi yang dibangun sendiri oleh masyarakat pesantren bila tidak hormat maka tidak akan mendapatkan berkah, dari sinilah terbangun kepatuhan tanpa batas dalam term *sami'na wathana*. Kultur feodalistik tersebut menyebabkan kyai selalu ingin ditempatkan pada posisi superior. Superioritas kyai tersebut melahirkan karakter kepribadian individualis yang tidak mau diintervensi.

5. Konflik Manajemen

Manajemen merupakan faktor kelemahan pesantren tradisional, padahal keberadaan manajemen yang mapan untuk sebuah institusi semacam pesantren sangat diperlukan agar kelangsungan suatu pesantren dapat berjalan dengan baik. Kelemahan manajemen yang ada pada kyai pesantren tidak disadari sebagai bentuk kelemahan kyai dalam mengelola pesantren. Tapi lain pengasuh lain atau pengurus yang ada di pesantren yang memiliki kemampuan manajemen tidak

diberikan kewenangan, dari dua kenyataan ini, acapkali berbenturan karena pribadi kyai yang tidak boleh ditentang, dari sinilah kemudian muncul konflik, bahkan tidak jarang di antara pengasuh atau kyai muda akhirnya menyempal bahkan mendirikan pesantren baru. Konflik yang disebabkan oleh faktor manajemen biasanya mengemuka manakala kyai sudah tidak mau kompromi dan berwatak otoriter.

Berdasarkan permasalahan tersebut, ada yang relevan dengan konflik yang terjadi di Magelang: *Pertama*, menyangkut konflik keluarga, meskipun tidak nampak namun ada indikasi konflik tersebut terjadi. Dalam hal ini terjadi manakala dua tokoh yakni antara Gus Aly Choisor putra dari almarhum KH. Ahmad Abdul Haq (Mbah mad) Watu Congol Muntilan dengan Gus Yusuf putra dari almarhum KH. Abdurahman Chudhori Tegalrejo Magelang, merupakan satu keluarga, dan keduanya memiliki kelebihan-kelebihan masing-masing sebagai generasi penerus ayahnya. Para pengikut kyai tersebut masing-masing mempunyai pandangan berbeda tentang siapa yang lebih pantas sebagai pengganti figur ayahnya, serta masing-masing memiliki kelebihan di mata para santri dan umatnya demikian halnya kepribadian mereka yang berbeda pula. *Kedua*, menyangkut konflik politik merupakan konflik yang sangat terasa sekali aromanya karena secara tidak langsung berimbas pada konflik antar massa pendukungnya. Dalam hal ini pendukung masing-masing kyai mengklaim pilihan partai dari kyai-nya adalah yang terbaik; Gus Aly Choisor berafiliasi dengan PDIP dan Gus Yusuf dengan PKB. Meskipun partai yang satunya merupakan partai berbasis nasionalis sedang yang satunya sebagai partai berbasis Islam namun justru di Magelang PDIP inilah yang selalu memenangkan di setiap pemilu, baik legislatif, pilkada maupun pilpres. Dengan demikian visi dan misi beliau berdua sebagai pimpinan/pengurus NU Magelang menjadi berbeda, dan tentunya menimbulkan perbedaan dukungan, yang apabila tidak dikelola dengan baik perbedaan tersebut menyebabkan konflik. *Ketiga*, menyangkut konflik pengakuan ummat, dalam hal ini meskipun tidak nampak atau termanifestasi secara jelas namun ada benih-benih ke arah demikian. Dalam hal ini ada persaingan terselubung antara Gus Aly dan Gus Yusuf dalam memperoleh dukungan baik dukungan sebagai tokoh agama dengan para santri-santriwati maupun dukungan politik dengan partai politiknya. Masing-masing punya argumen sendiri (yang tentunya bagus-bagus) yang pada gilirannya diakui oleh pengikutnya sebagai argumen yang terbaik daripada yang lainnya. *Keempat*, menyangkut konflik feodalisme, dalam hal ini tentunya ada kaitannya dengan pengkultusan terhadap figur kyai, berimplikasi pada pola hubungan kyai dan santri. Kata-kata, tindakan, petuah, maupun pilihan dari kyai dianggap merupakan hal yang terbaik yang wajib didengar, diresapi dan diikuti oleh umatnya, sehingga para pengikutnya akan membela apa yang menjadi pilihan atau pegangan dari kyainya. Demikian halnya dengan pilihan partai politik, pilihan kyainya dianggap yang terbaik namun tidak diimbangi dengan toleransi terhadap pilihan orang lain sehingga rentan terhadap konflik.

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa pada intinya terjadinya pegeseran ke 'NU' an Magelang dari NU struktural ke kultural, faktor penyebabnya adanya konflik

terjadi sebagai bentuk perbedaan pilihan politik dari kyai yang diikuti oleh para pengikutnya tanpa toleransi yang baik.

G Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, konflik kyai NU terjadi karena dua tokoh yang masih ikatan keluarga yakni antara Gus Aly dengan Gus Yusuf, masing-masing sebagai pemimpin pondok pesantren yang berbeda, berafiliasi dengan dua partai politik yang berbeda, yaitu PKB dan PDIP. Massa pendukung (Warga NU) yang dahulunya menghormati dan mendukung keberadaan NU otomatis menjadi dua kubu massa yang menjadi pendukung salah satu kyai tersebut, sehingga timbul konflik kepentingan politik. Gesekan konflik sebagaimana yang terjadi di Magelang, merupakan gesekan konflik yang terjadi dalam masyarakat pesantren sebagai bentuk resonansi konflik di dunia politik dan kekuasaan, akibat persoalan politik, dan kekuasaan. Konflik tersebut berimbas masuk ke organisasi NU. *Kedua*, tipe konflik yang nampak dari konflik antar warga NU di Kabupaten Magelang lebih condong kepada tipe konflik temporal. Temporal dalam arti terjadi hanya dalam kurun waktu tertentu saja yaitu dalam rangkaian kegiatan pesta demokrasi pemilihan umum hingga usainya pemungutan suara. Demikian halnya dengan kehidupan/ jalannya organisasi NU secara struktural akan bersifat temporal organisasi NU (secara struktural). Dengan demikian Perlu adanya manajemen konflik yang baik sehingga konflik tidak menjadi besar dan sulit untuk diatasi bahkan menjadi konflik permanen, demikian pula dengan potensi munculnya perpecahan ummat.

Hendaknya sebagai panutan umat, para kyai seharusnya mampu menyelesaikan konflik secara cantik sesuai kultur NU yang suka bersilaturrehmi, meski nama dan kebesarannya yang jadi pertarungan. Masyarakat harus didorong untuk berani berpikir menentukan pilihannya sendiri tanpa harus dibebani, apalagi dipengaruhi untuk memilih calon tertentu. Pilihan masyarakat tidak harus disamakan dengan pilihan kyai, bahkan bila harus berlebihan sampai menyebabkan konflik. Tugas kyai sebagai pemberi pencerahan masyarakat itu diwujudkan dengan semangat menanamkan sikap kritis masyarakat. Sikap kritis masyarakat itu sangat dibutuhkan sebagai sistem kontrol dan keseimbangan (*check and balance*) terhadap struktur kekuasaan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il, 1926-1999*. Yogyakarta: LKiS Yogya, 2004
- Anas Sudiono, *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press, 1991
- Anggaran Dasar NU Bab.1 pasal 1,3 dan 4 hasil muktamar xxv di Kediri, 21-27 November 1999
- Asmaidi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kulitatif serta Kombinasinya dalam penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Munawir Abdul Fatah, *"Tradisi Orang-Orang NU"*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.

- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia, 1977.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah Pendekatan Praktis*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- Suara Merdeka 18 April 2007 “Pilihan Warga NU pada Pilgub 2008”
- Saifulloh Ma’sum, *Kharisma Ulama Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*. Bandung: Mizan, 1998.
- Suaidi Asyari, *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah*. Yogyakarta : LKiS, 2009.
- Tempo, Minggu April 2007
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantrean (studi tentang Pandangan Hidup Kyai)*. Jakarta: LP3ES, 1982.